

Peran Kelompok Kepentingan dalam Pendidikan Nasional Indonesia: Tinjauan Kritis Terhadap Aspirasi Politik Pengurus Besar PGRI

Surya Bakti¹, Muhammad Sirozi², Sholihah Titin Sumanti³, Muhammad Yusuf⁴

^{1,4}Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, Indonesia, ²UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia,

³UIN Sumatera Utara, Indonesia

¹suryabakti@ishlahiyah.ac.id

Abstrak

Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai peran kelompok kepentingan dalam pendidikan Nasional Indonesia. Tinjauan yang dilakukan dalam penelitian ini mengarah pada aspirasi politik pengurus besar PGRI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Adapun hasil dan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dapat diketahui jika Kebijakan politik PGRI terkait dengan pendidikan, seperti: Memberikan Masukan untuk Peta Jalan Pendidikan: Unifah Rosyidi hadir untuk memberikan masukan PGRI terkait dengan peta jalan pendidikan, menunjukkan keterlibatan aktif dalam memberikan kontribusi dan solusi terhadap isu-isu pendidikan di Indonesia.

Kata kunci: Pendidikan Nasional Indonesia, Aspirasi Politik

Pendahuluan

Pendahuluan harus berisi apa yang ingin dicapai oleh penulis dan menyatakan masalah yang diteliti. Penulis dianjurkan untuk menulis latar belakang artikel mereka dalam empat (4) bagian. Pertama, nyatakan masalah empiris atau teoritis yang menjadi dasar penelitian Anda. Hal ini dapat ditulis dalam satu atau dua paragraf.

Setiap individu atau komunitas memiliki kepentingan yang harus dicapai dan dijaga demi kelangsungan hidupnya, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, maupun negara. Untuk mencapai dan menjaga kepentingan tersebut, diperlukan kerja keras dan perjuangan yang melibatkan partisipasi individu, masyarakat, pemerintah, dan aktor internasional (Bambang & Sugianto, 2007). Wujud dari kekuatan ini dalam bentuk organisasi yang mewakili kepentingan tertentu, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (Ormas), dan organisasi lainnya. Adanya dominasi individu (Syarbani, 2002), Masyarakat, negara, dan negara lain yang mempunyai kekuatan besar terhadap individu, Masyarakat, negara, dan negara lain yang lemah (terbelakang, baru, berkembang) merupakan latar belakang dari terbentuknya kelompok kepentingan ini.

Masyarakat dapat mengalami keuntungan atau kerugian dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kepentingan dan kebutuhan rakyat bisa saja terpenuhi atau terabaikan. Oleh karena itu, rakyat memiliki peran yang penting dalam melihat kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Untuk itu, mereka dapat menyampaikan kepentingan dan kebutuhan mereka kepada pemerintah melalui kelompok-kelompok yang dibentuk berdasarkan kepentingan bersama

Supaya pembahasan dalam tulisan ini tidak bias maka penulis memfokuskan bahasan pada makalah ini terkait Peran Kelompok Kepentingan dalam Pendidikan Nasional (Tinjauan kritis terhadap Aspirasi Politik Pengurus Besar PGRI).

Kelompok Kepentingan (Interest Group, advocacy group, or pressure group) adalah suatu asosiasi, organisasi formal, yang didasari atas satu atau lebih perhatian bersama, dengan tujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik agar sesuai dengan keinginan mereka. Seluruh kelompok kepentingan memiliki suatu kesamaan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah agar menguntungkan mereka atau sesuai dengan tujuan mereka (Indriyani & Ariyani, 2012).

Kelompok kepentingan sudah lama hadir dalam kehidupan politik modern. Kelompok tersebut dapat dibentuk lewat institusi atau organisasi. Di Inggris, kemunculan kelompok kepentingan ditandai dengan adanya organisasi seperti Masyarakat Abolisi yang dibentuk tahun 1807 dengan tujuan untuk menghapus perdagangan budak. Di Amerika Serikat, gerakan itu ditandai dengan berbagai asosiasi dalam masyarakat untuk tujuan membela kepentingan kelompok tertentu, baik sebagai oposisi terhadap pihak Inggris maupun dalam konteks pertumbuhan pemerintahan Amerika pada awal kemerdekaan.

Tujuan mereka adalah untuk mempengaruhi proses pengambilan kebijakan pemerintah agar sejalan dengan keinginan kelompoknya. Jika dibandingkan dengan fungsi politik, tujuan tersebut agak berbeda dan lebih spesifik, seperti yang didefinisikan oleh Giovanni Sartori, di mana partai politik adalah *any political group that presents at elections, and is capable of placing through elections, candidates for public offices* (Amka, 2020).

Dari definisi tersebut, tujuan partai politik adalah untuk memperoleh kekuasaan dengan menempatkan wakil-wakilnya dalam pemerintahan atau meraih jabatan-jabatan dalam struktur pemerintahan. Namun, dalam prakteknya, terdapat berbagai macam tipe kelompok kepentingan yang beroperasi di masyarakat dengan tujuan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Sebagai aktor non-pemerintah, kelompok kepentingan ini dapat berasal dari berbagai latar belakang, seperti kelompok profesional, serikat buruh, pedagang, pengusaha, organisasi keagamaan, persatuan pedagang, organisasi mahasiswa, lembaga pemikiran, asosiasi cendekiawan atau pakar, asosiasi perusahaan, universitas, organisasi berbasis etnis, daerah, keturunan (wangsa), dan lainnya. Secara umum, kelompok kepentingan dapat dibagi menjadi dua jenis:

Ada dua jenis kelompok kepentingan: kelompok kepentingan privat, yang berupaya memperjuangkan kepentingan anggotanya dalam konteks kehidupan umum, termasuk pengacara, dokter, akuntan, dosen, guru, hakim, dan golongan profesional lainnya, serta produsen dalam bidang usaha tertentu. Kelompok kepentingan publik, di sisi lain, berorientasi pada pengaruh terhadap pemerintah untuk mengambil tindakan yang menguntungkan kepentingan umum secara keseluruhan daripada kepentingan anggotanya. Contoh-contohnya termasuk organisasi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Kamar Dagang dan Industri (KDI), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Ikatan Advokat Indonesia (IAI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan lain-lain.

Politik di suatu negara khususnya di Indonesia sangat menentukan arah dari pendidikan karena pendidikan dan politik saling berkaitan. Ada dua pandangan yang berbeda dalam masyarakat terkait politik dan pendidikan. Pertama, ada kelompok masyarakat yang berpendapat bahwa politik dan pendidikan adalah dua hal yang terpisah; politik adalah politik, dan pendidikan adalah pendidikan. Namun, ada masyarakat yang berasumsi lain bahwa politik dan pendidikan sangat berhubungan dan saling terkait satu dengan yang lain (Danim, 2011).

Politik di suatu negara sangat berperan dalam menentukan perkembangan pendidikan karena pendidikan dan politik saling berkaitan. Banyak ahli meyakini bahwa pendidikan merupakan salah satu alat atau sarana untuk mempertahankan kekuasaan negara. Politik kebudayaan suatu negara diarahkan melalui lembaga-lembaga pendidikan, sehingga dalam

sistem pendidikan, terdapat arus keinginan politik atau struktur kekuasaan dalam suatu masyarakat (Anwar, 2018).

Dalam melestarikan kekuasaan negara secara umum upaya-upaya dibedakan pada beberapa sistem atau pendekatan, yaitu: Moralisme Religius, Masa Aufklarung, dan Perkembangan Nasionalisme.

Cikal bakal lahirnya PGRI diawali dengan nama PGHB (Persetuan guru Hindia Belanda) yang didirikan pada tahun 1912 kemudian berubah menjadi PGI (Persatuan guru Indonesia) pada tahun 1932 dan setelah merdeka berubah menjadi PGRI. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) adalah organisasi perjuangan, profesi dan ketenagakerjaan bersekala nasional beranggotakan para guru dan tenaga kependidikan. Pada tanggal 25 November 1945 dalam acara kongres guru Indonesia pertama di Surakarta, Jawa Tengah organisasi guru ini didirikan. Organisasi PGRI terdaftar di Departemen Kehakiman yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman pada 20 September 1954 dengan Nomor: 1.A.5/82/12 yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945. PGRI memiliki sifat sebagai berikut :

- a. Unitaristik artinya anggota PGRI tidak memandang pangkat dan jabatan, tempat bekerja, jenis kelamin , dan agama.
- b. Independen artinya berlandaskan prinsip kemandirian organisasi dengan mengutamakan kemitrasejajaran dengan berbagai pihak.
- c. Non-politik praktis artinya PGRI tidak terikat dan atau tidak mengikatkan diri pada kekuatan organisasi tertentu atau partai politik apapun.

Wadah berkumpulnya guru atau tenaga kependidikan yang bekerjasama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa di Indonesia yaitu PGRI. PGRI diartikan sebagai sebuah organisasi profesi, organisasi keteagakerjaan dan organisasi perjuangan yang proaktif untuk mengembangkan profesi keguruan, ilmu pengetahuan, kemasyarakatan dan pembangunan dalam dunia pendidikan (Restoeningroem & Sinuarat, 2019).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*literatur study*), yang melibatkan serangkaian kegiatan terkait dengan pengumpulan data dari berbagai sumber literatur, membaca, mencatat, dan mengelola data secara sistematis, analitis, dan kritis tentang peran kelompok kepentingan dalam pendidikan nasional Indonesia, dengan fokus pada aspirasi politik pengurus besar PGRI. Persiapan penelitian dengan studi literatur mirip dengan penelitian lain, namun sumber dan metode pengumpulan data berfokus pada literatur, artikel, dan penelitian terkait variabel yang diteliti.

Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*). Analisis data dimulai dengan meninjau hasil penelitian yang paling relevan, relevan, dan cukup relevan, dimulai dari yang paling mutakhir dan bergerak mundur ke tahun yang lebih lama. Peneliti kemudian mengevaluasi abstrak dari setiap penelitian untuk menentukan relevansinya dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, peneliti mencatat bagian-bagian penting dan relevan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Bila dilihat dari garis besarnya, peran kelompok ini sangat berpengaruh besar pada pendidikan. Dengan tujuan untuk memengaruhi keputusan politik yang berhubungan dengan pendidikan, para kelompok kepentingan ini akan berupaya meyakinkan para pejabat publik untuk bertindak sesuai dengan suara atau kepentingan anggota kelompoknya.

Mengajarkan prinsip-prinsip, doktrin, dan kesepakatan negara melalui pendidikan sering dilakukan secara tidak langsung, dimana hal tersebut dapat sulit dilacak secara sekilas karena biasanya disampaikan secara implisit dalam materi pendidikan atau kurikulum. Sebagai hasilnya, masyarakat yang menerima pendidikan secara tidak sadar juga mendukung tujuan khusus negara tersebut (Dimiyati, 2019).

PGRI, sebagai organisasi profesi terbesar bagi guru di Indonesia, dianggap sangat ideal dan sesuai sebagai platform untuk meningkatkan profesionalisme guru, mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi, serta memperjuangkan nasib guru dan pendidikan secara keseluruhan (Fitriani, 2016). Dengan dukungan dan organisasi yang dinamis, prospektif, dan responsif terhadap tantangan masa depan, guru dan tenaga kependidikan dapat memainkan peran maksimal dalam menjalankan tugas mereka. Sejarah telah membuktikan bahwa ketekunan, solidaritas, dan perjuangan PGRI telah menjadikannya bukan hanya organisasi guru terbesar di Indonesia, tetapi juga menjadi bagian dari jaringan organisasi guru global yang tersebar di 158 negara dengan lebih dari 25 juta anggota.

Penting bagi seluruh kader PGRI untuk menunjukkan sikap cerdas dalam menghadapi tahun politik, dengan mempertimbangkan berbagai hal sebelum mengambil keputusan. Sebagai bukti netralitas PGRI, Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi, telah menginstruksikan kepada seluruh pengurus dan anggota PGRI untuk tidak terlibat dalam politik praktis atas nama PGRI, dan menghindari menyeret-nyeret nama organisasi PGRI. Namun, jika ada individu kader terbaik PGRI yang ingin mencalonkan diri dalam konteks legislatif, baik di DPRD, DPR RI, atau DPD RI, mereka diperbolehkan tanpa harus menggunakan logo dan panji-panji PGRI. Hal ini karena anggota PGRI akan mengenali kader terbaik PGRI berdasarkan integritas dan dedikasi mereka yang sesungguhnya, yang merupakan esensi dari PGRI. Penting untuk mengikuti aturan yang berlaku dan mematuhi AD/ART PGRI jika ingin meraih kesuksesan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua orang memiliki waktu dan kesempatan masing-masing, dan kita hanya perlu menunggu saat yang tepat untuk semua hal yang indah (Said, 2019).

Tabrani Yunis merupakan Direktur Center for Community Development and Education (CCDE), Banda Aceh. Dia menyatakan bahwa menjadikan PGRI sebagai wadah saluran apresiasi sudah tidak dapat lagi dilakukan. Ditambah lagi dari dulu, kepemimpinan PGRI tidak dipegang oleh guru, melainkan pejabat dari Dinas Pendidikan yang menggunakan PGRI sebagai kendaraan politik untuk kepentingannya. Hal itu tentu tidak adil apabila guru dilarang memperjuangkan nasib dan hak mereka untuk mencari organisasi sebagai guru alternative (Seotipjo & Kosasi, 2011).

Menurut Tabriani, untuk menampung pendapat guru yang tidak tersuarakan selama ini di PGRI dapat ditampung dengan adanya beragam organisasi guru alternatif. Hal tersebut tentu menjadi hal yang sangat positif. Tabriani berpendapat bahwa PGRI merupakan produk rejim orde baru yang mengikut pada pemerintah. Tabriani kecewa terhadap pernyataan mantan Wapres yaitu Jusuf Kalla yang meminta agar para guru tetap berada dibawah PGRI. Ia mengatakan jika organisasinya terpecah nasib para guru nantinya sama dengan buruh.

Sah bagi penulis untuk menyatakan hal-hal demikian, dengan tujuan sebagai refleksi bagi PGRI, walaupun sudut pandang penulis memiliki kesan tidak mengikuti perkembangan dan partisan. Apa yang dilihat Tabriani tentang PGRI masih dari sudut pandang yang lama yaitu hanya sebatas kendaraan politik bagi golongan tertentu yang tidak tanggap dan tidak sanggup menangani masalah guru.

Apa yang ditulis oleh Tabriani ada benarnya jika melihat PGRI pada masa orde baru. Akan tetapi perlu diketahui PGRI banyak Sekai perubahan sejak era reformasi tahun 1997. PGRI mereformasi diri sebagai organisasi profesi, ketenagakerjaan dan perjuangan yang bersifat

unitaristik, independen, dan nonpolitik praktis yang merupakan bentuk PGRI menyadari kelemahan yang terjadi di masa lalu telah ada sejak tahun 1997. Pelajaran bagi PGRI agar terus konsisten dan berjuang di jalur peningkatan profesional, kesejahteraan dan perlindungan profesi guru secara khusus, dan peningkatan mutu pendidikan secara umum merupakan pembelajaran dari kejadian di masa lampau. PGRI juga sudah memiliki struktur yang rapi mulai Pengurus Besar (Nasional), Provinsi, Kabupaten/Kota, Cabang hingga ranting. Hal itu telah terbentuk dengan baik hingga ke tingkat kecamatan, dan memberikan kekuatan pada para guru dan tenaga kependidikan untuk berjuang meningkatkan harkat dan martabat yang selama ini terpinggirkan.

Siapa pun yang berprofesi sebagai guru, baik dari jenjang TK hingga perguruan tinggi, tetap dianggap sebagai guru oleh PGRI. Tugas utama guru bukan hanya mengajar, tetapi juga mendidik anak-anak bangsa agar tidak hanya cerdas dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan juga memiliki kepribadian yang utuh dan berkembang secara berkelanjutan. PGRI memiliki anggota yang beragam, mulai dari guru TK hingga perguruan tinggi, baik yang bekerja di sekolah negeri maupun swasta, termasuk guru umum dan guru agama, serta anggota pendidik lainnya seperti pengawas dan pustakawan. Selain itu, guru-guru kini semakin kompeten. Jika dahulu pimpinan PGRI banyak berasal dari kalangan birokrat, sekarang hampir seluruh pengurus PGRI berasal dari kalangan guru.

Ilustrasi tersebut hanya menggambarkan kondisi PGRI setelah reformasi. Berbagai masalah guru mulai terungkap sejak reformasi. Masalah yang baru muncul karena penerapan otonomi daerah. Adanya politik kepentingan pada pilkada banyak guru yang menjadi korban karena hal tersebut. Selain itu, birokrasi daerah menghambat tunjangan profesi dan tunjangan kependidikan. Hal tersebut terjadi karena nasib guru di daerah sekarang ditentukan oleh bupati atau wali kota setempat, bukan lagi oleh pemerintah pusat. Dalam pandangan daerah Kepala Dinas Pendidikan sama dengan kepala-kepala dinas yang lainnya. Akibatnya, posisi kepala dinas Pendidikan sering diisi oleh mantan Kepala Dinas Pemakaman atau Kepala Dinas Ketertiban Umum (Tibum). Dunia Pendidikan memiliki ciri khasnya sendiri sehingga hal tersebut sangat tidak ideal. Sebagai penanggung jawab dari masa depan manusia dan negara dunia Pendidikan memiliki "tugas suci" (sacred mission). Oleh karena itu, PGRI berupaya keras menyuarakan pentingnya pendidikan bagi sebuah negara. Masa depan bangsa akan suram jika pendidikan diabaikan.

Perbaikan system Pendidikan secara menyeluruh merupakan Langkah awal kemajuan suatu negara. Pada saat Jepang hancur di bom atom Kaisar Hirohito bukan bertanya berapa emas atau berlian yang tersisa melainkan menanyakan berapa guru yang masih tersisa. Hal ini dikarenakan guru merupakan penyelamat sebuah bangsa. Pada tahun 2008, anggaran pendidikan meningkat sebesar 20 persen dari APBN setelah PGRI selama tiga tahun berturut-turut memenangkan gugatan terhadap pemerintah melalui Mahkamah Konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa PGRI terus berjuang untuk meningkatkan harkat dan martabat guru serta pendidikan nasional (Henawanto, 2014).

Kemenangan ini merupakan kemenangan bagi para guru dan masyarakat Indonesia yang memahami betapa pentingnya pendidikan untuk kemajuan bangsa dan negara. Keberhasilan dalam mencapai alokasi 20 persen untuk Pendidikan mendapat apresiasi dari mitra yang berada di luar negeri. Oleh karena itu, dalam berbagai pertemuan organisasi profesi guru di tingkat internasional, PGRI sering diminta untuk menjelaskan langkah-langkah perjuangannya yang berhasil menekan pemerintah untuk memenuhi tuntutan para guru. Meskipun anggaran 20 persen ini merupakan amanat UUD, perjuangannya tidaklah mudah. Seluruh masyarakat Indonesia mengetahui betapa sulitnya memperjuangkan anggaran 20 persen tersebut untuk pendidikan.

Hal ini berkaitan dengan Kongres PGRI XVIII pada tahun 1998 di Bandung, yang menginisiasi pembentukan undang-undang tentang guru, yang kemudian berkembang menjadi Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD). Meskipun UUGD memiliki beberapa kelemahan, undang-undang ini sekarang menjadi landasan kuat untuk mewujudkan guru profesional yang sejahtera dan bermartabat.

Tanpa mengabaikan keberadaan organisasi guru alternatif seperti yang disampaikan oleh Tabriani, PGRI memiliki sejarah dan modal awal yang kuat dalam memperjuangkan kepentingan guru. Dengan jumlah guru, baik negeri maupun swasta, yang mencapai 2,7 juta orang, serta kondisi lokasi, keuangan, dan sarana prasarana yang sebagian besar masih di bawah standar pendidikan modern dunia, tugas PGRI dan organisasi guru alternatif menjadi sangat besar. Dalam tugas guru mendidik generasi bangsa banyak masalah yang dialami para guru baik social, ekonomi, hukum dan lainnya. Bahkan hingga kini, masih banyak guru swasta di daerah yang hanya menerima honor beberapa ribu rupiah, dan ada yang tidak menerima honor sama sekali. Selain itu, nasib guru di daerah terpencil juga memprihatinkan karena gaji mereka sering terlambat tiga hingga enam bulan. Guru-guru di daerah juga kebingungan dengan kebijakan pemerintah pusat yang memaksa sekolah-sekolah untuk mengikuti standar nasional, seperti ujian nasional dengan nilai tertentu. Sementara itu, pemerintah daerah yang ingin terlihat maju, memaksa guru untuk meluluskan siswa yang mengikuti ujian akhir, meskipun mereka mengetahui kapasitas siswa belum memadai akibat kurangnya sarana dan prasarana pendidikan. Guru seperti memegang buah simalakama dari kondisi tersebut. Apakah guru harus mengikuti keinginan dari pusat, daerah, atau hati nuraninya yang ingin melihat anak muridnya pintar dan memiliki moral? Di Tengah pusaran kepentingan dari pusat dan daerah, guru-guru yang memilih mengikuti hati nuraninya harus menghadapi berbagai kasus hukum yang menimpanya.

Mengingat besarnya tantangan di masa depan, tidak salah rasanya Wapres MJK mengajak guru-guru untuk membesarkan PGRI melihat dari fenomena yang terjadi sebelumnya. Ini penting dilakukan agar PGRI dapat memperkuat posisinya dalam menyuarakan kepentingan para guru di tengah dinamika kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah. Pendapat dari organisasi guru akan diabaikan oleh negara dan birokrasi jika tidak didukung oleh solidaritas dan kekuatan yang kuat. Jika kita melihat sejarah PGRI yang berdiri pada tanggal 25 November 1945 di Solo, organisasi ini merupakan hasil gabungan dari berbagai organisasi guru yang ada pada masa itu. Agar Langkah-langkah guru lebih efektif dan terkoordinasi, organisasi-organisasi guru tersebut setuju untuk bergabung menjadi PGRI untuk perjuangan besar di masa depan. Dengan latar belakang seperti itu, harusnya kita dapat melihat lebih cerdas dan jernih. PGRI diambil alih oleh negara selama rezim orde baru. Pertanyaannya, adakah organisasi resmi pada masa itu yang benar-benar bebas dari control rezim? Ini bukan pembelaan, tetapi kenyataan. Pada masa itu, media massa juga terbatas dalam memberikan perlawanan karena terikat oleh peraturan dan undang-undang yang mendukung rezim yang berkuasa.

Pada akhirnya, aspirasi bangsa Indonesia untuk mencapai tingkat kesetaraan dengan negara maju lainnya mengarah pada penelusuran sejarah yang panjang, di mana pendidikan menjadi kunci utama perubahan. Masa depan Indonesia sangat tergantung pada bagaimana kita mempersiapkan generasi muda dengan pendidikan yang berkualitas, bermoral, dan dapat diakses di seluruh penjuru negeri. Dengan demikian, di masa depan anak-anak Indonesia akan menjadi pribadi yang cerdas, berbudaya, bermoral, kompetitif dan menghargai kualitas (Hurhadi, 2017).

Tinjauan kritis terhadap PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) bisa mencakup berbagai aspek, tergantung pada sudut pandang dan konteks tertentu. Berikut adalah beberapa poin yang dapat diperhatikan:

- a. Kinerja dan Pelayanan: Evaluasi terhadap kinerja PGRI dalam memberikan pelayanan kepada para guru, baik dalam hal pembinaan profesional maupun kepentingan sosial-ekonomi. Bagaimana efektivitas organisasi dalam mendukung pengembangan karier, memberikan pelatihan, dan memperjuangkan hak-hak guru?
- b. Transparansi dan Akuntabilitas: Sejauh mana PGRI memiliki transparansi dalam pengelolaan anggaran, pemilihan pengurus, dan pengambilan keputusan? Bagaimana sistem akuntabilitas di dalam organisasi tersebut?
- c. Advokasi dan Kepentingan Politik: Apakah PGRI lebih banyak bertindak sebagai pengawal kepentingan politik atau sebagai pembela kepentingan guru dan pendidikan? Adakah indikasi bahwa kepentingan politik merusak misi inti organisasi?
- d. Respons terhadap Isu Pendidikan: Seberapa responsif PGRI terhadap isu-isu aktual dalam pendidikan, seperti kurikulum, evaluasi kinerja guru, atau perubahan teknologi dalam pembelajaran?
- e. Kedudukan Etis dan Profesionalisme: Bagaimana PGRI menangani isu-isu etis dan profesionalisme di antara anggotanya? Apakah ada catatan pelanggaran etika atau tindakan yang merugikan profesi guru?
- f. Partisipasi Anggota: Seberapa aktif anggota PGRI dalam kegiatan organisasi? Apakah PGRI mampu mewakili keberagaman pandangan dan kepentingan guru di seluruh Indonesia?
- g. Kontribusi Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan: Secara keseluruhan, seberapa besar peran PGRI dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia? Apakah upaya-upaya yang dilakukan PGRI mampu membawa perubahan positif secara signifikan?

Beberapa kelemahan PGRI dalam konteks pendidikan nasional yang mungkin perlu dipertimbangkan meliputi:

- a. Politik dan Birokrasi: PGRI sering dianggap memiliki keterlibatan yang kuat dalam politik dan birokrasi, yang kadang-kadang dapat mengganggu fokus organisasi pada upaya peningkatan kualitas pendidikan. Keterlibatan politik ini bisa mengakibatkan prioritas organisasi menjadi tidak selaras dengan kebutuhan pendidikan sebenarnya.
- b. Kualitas Pendidikan: Meskipun PGRI memiliki peran dalam mendukung guru dan pendidikan, kualitas pendidikan di Indonesia masih memiliki tantangan yang signifikan. Beberapa kritikus mungkin berpendapat bahwa PGRI belum berhasil secara efektif mengatasi masalah kualitas tersebut.
- c. Transparansi dan Akuntabilitas: Terdapat kekhawatiran tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dan kebijakan di PGRI. Kurangnya transparansi ini bisa merugikan kepercayaan masyarakat dan anggota terhadap organisasi.
- d. Kurangnya Inovasi: Beberapa pihak mungkin mengkritik PGRI karena kurangnya inovasi dalam menghadapi tantangan pendidikan modern, seperti integrasi teknologi dalam pembelajaran atau pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masa depan.
- e. Ketidakmerataan Representasi: PGRI mungkin cenderung lebih aktif di beberapa wilayah atau tingkat pendidikan daripada yang lain, sehingga terjadi ketidakmerataan dalam representasi dan pelayanan kepada semua anggota guru di seluruh Indonesia.

- f. Pertentangan Kepentingan: Terkadang, PGRI harus menangani pertentangan antara kepentingan anggota individu, kepentingan kelompok, dan kepentingan umum pendidikan nasional, yang dapat mengaburkan fokus dan menghambat kemajuan.
- g. Kegagalan dalam Menangani Isu-isu Kritis: Beberapa pihak mungkin menilai bahwa PGRI belum berhasil secara memadai mengatasi isu-isu kritis dalam pendidikan, seperti kesenjangan dalam akses pendidikan, kurangnya kualitas guru, atau masalah struktural dalam sistem pendidikan (Budiarto, 2009).

Penting untuk diingat bahwa sementara ada kelemahan yang bisa diidentifikasi, PGRI juga memiliki potensi besar untuk memainkan peran yang positif dalam pembangunan pendidikan nasional jika masalah-masalah tersebut dapat diatasi dan organisasi diberi dukungan yang tepat.

Kesimpulan

Kelompok kepentingan (*Interest Group*) merupakan organisasi yang berupaya mempengaruhi kebijakan pemerintah, tanpa berniat untuk mendapatkan jabatan publik. Kecuali dalam situasi luar biasa, kelompok kepentingan tidak berusaha mengendalikan pemerintahan secara langsung.

Pendidikan politik adalah proses dialogis antara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini anggota masyarakat mengenali dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, serta simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik.

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) merupakan organisasi perjuangan, profesi dan ketenagakerjaan bersekala nasional yang anggotanya terdiri dari guru dan tenaga kependidikan. Organisasi ini didirikan pada 25 Nopember 1945, saat kongres guru Indonesia pertama di Surakarta, Jawa Tengah.

Kebijakan politik PGRI terkait dengan pendidikan, seperti: Memberikan Masukan untuk Peta Jalan Pendidikan: Unifah Rosyidi hadir untuk memberikan masukan PGRI terkait dengan peta jalan pendidikan, menunjukkan keterlibatan aktif dalam memberikan kontribusi dan solusi terhadap isu-isu pendidikan di Indonesia, Tegaskan Independensi dan Komitmen Perjuangan Guru, Netralitas PGRI itu dipilih karena anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan posisinya sebagai mitra kerja strategis pemerintah dalam bidang pendidikan.

Beberapa kelemahan PGRI dalam konteks pendidikan nasional yang mungkin perlu dipertimbangkan meliputi: Politik dan Birokrasi: PGRI sering dianggap memiliki keterlibatan yang kuat dalam politik dan birokrasi, yang kadang-kadang dapat mengganggu fokus organisasi pada upaya peningkatan kualitas pendidikan, Kualitas Pendidikan: Meskipun PGRI memiliki peran dalam mendukung guru dan pendidikan, kualitas pendidikan di Indonesia masih memiliki tantangan yang signifikan Dll.

References

- Amka, D. (2020). *Buku Ajar Profesi Kependidikan (Menjawab Problematika Profesi dan Kinerja Guru)*. Nizamia Learning Center.
- Anwar, M. (2018). *Menjadi Guru Profesional*. Prenada Media.
- Bambang, S., & Sugianto. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Grahadi.
- Budiarto. (2009). *Peranan PGRI Sebagai Kelompok Kepentingan (Interest Groups) Dalam Memperjuangkan Kesejahteraan Guru (Studi Kasus Pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti 2004 s/d 2009)*. Universitas Diponegoro.
- Danim, S. (2011). *Pengembangan Profesi Guru Dari Pra-Jabatan, Induksi, Keprofesional*

Madani. Kencana.

- Dimiyati, A. (2019). *Pengembangan Profesi Guru*. CV. Gre Publishing.
- Eddi Wibowo, D. (2004). *Ilmu Politik Kontemporer*. YPAPI.
- Fitriani. (2016). Peranan PGRI Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Di Kecamatan Manggala Kota Makassar. *Jurnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikir, Penelitian Dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan*, 3(3).
- Henawanto, A. (2014). Persepsi Guru Terhadap Persatuan Guru Republik Indonesia Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru. *Jurnal Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan*, 1(1).
- Hurhadi, A. (2017). *Profesi Keguruan Menuju Pembentukan Guru Profesional* (G. Pena (ed.)).
- Indriyani, W., & Ariyani, R. M. (2012). Pengaruh Antara Peran Organisasi Profesi Keguruan (PGRI) Terhadap Peningkatan Kompetensi Guru IPS Di Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka. *Jurnal Ekonomi*, 1(1).
- Restoeningroem, R., & Sinuarat, J. Y. (2019). *Sejarah Perjuangan Jati Diri PGRI*. PT Pustaka Mandiri.
- Said, K. (2019). *Pengembangan Profesi Guru Pada Kurikulum 2013*. PT. Indragini Dot Com.
- Seotipjo, & Kosasi, R. (2011). *Profesi Keguruan*. PT. Rineka Cipta.
- Syarbani, S. (2002). *Sosiologi dan Politik*. Ghalia Indonesia.

---Halaman ini sengaja dikosongkan---